

# Korupsi Menghambat Kemajuan SDM Boven Digoel

KABUPATEN BOVEN DIGOEL yang oleh banyak kalangan diramal akan menjadi contoh positif bagi kabupaten lain dalam hal pelayanan kepada publik ternyata tidak terbukti. Sejak dimekarkan dari Merauke tahun 2003 bersama Mappi dan Asmat, Kabupaten ini berubah menjadi surga bagi para Koruptor. Para Koruptor seenaknya merampok uang rakyat tanpa merasa bersalah.

Korupsi Jilid I – kita sebut “Jilid” karena kejahatan ini dilakukan secara periodik – dimulai secara besar-besaran ketika Yusak Yaluwo menjadi Bupati Boven Digoel pada tahun 2004. Dia dan kelompoknya yang mayoritas bukan Orang Asli Boven Digoel sukses merusak Boven Digoel dengan melahap Rp. 54,7 Milyar dari berbagai Pos Anggaran yang ada. Kejahatan ini berakhir dengan tindakan KPK yang, cukup tegas tapi tidak tuntas, berhasil membuat Yusak Yaluwo meringkuk seorang diri di LP Cipinang dengan hukuman 4,5 tahun penjara, subsidi 6 bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp. 200 Juta.

Tertangkapnya Yusak Yaluwo dan hukuman berat yang diberikan Pengadilan TIPIKOR kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Boven Digoel itu ternyata tidak memutus mata rantai Korupsi di Boven Digoel. Orang-orang yang mengendalikan Yusak Yaluwo, memanfaatkan kebodohnya dan berhasil menikmati Uang Rakyat Boven Digoel dalam jumlah besar saat ini masih terus berkeliaran dengan leluasa, merekayasa Administrasi Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, memegang posisi penting dan berhasil merampok uang rakyat Boven Digoel untuk babak kedua. Mereka inilah yang saat ini secara nyata sedang menjalankan Korupsi Jilid II di Boven Digoel.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua secara gamblang diungkapkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan keuangan yang mengarah pada Korupsi. Temuan tersebut dapat disebut sebagai berikut : (1) Saldo Aset Daerah sebanyak Rp.7,5 Miliar tidak bisa dijelaskan sementara Rp. 615 Juta hilang tanpa jejak; (2) Bappeda Boven Digoel pada tahun 2010 mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 11,5 Miliar secara tidak sah; (3) Anggaran pada Kas tiga SKPD sebesar Rp. 12,8 Milyar belum dipertanggungjawabkan; (4) Belanja Bantuan Sosial pada BPKAD dan PPKD belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Bansos. Dengan demikian total dana yang hilang tanpa jejak adalah sebesar Rp. 94.415.000.000.

Jumlah Rp. 94.415.000.000 yang menjadi perbincangan hangat saat ini tidak membuat Pemkab Boven Digoel merasa malu dan mempertanggungjawabkan kejahatannya di hadapan rakyat. Mereka terus berusaha merampok milik rakyat sebanyak mungkin di tengah-tengah sorotan media dan opini publik yang semakin jelas menempatkan mereka pada posisi hina sebagai BANDIT.

Pengakuan yang jujur datang dari Dokter Titus Tambaip, M.Kes. Asisten II Bidang Pemerintahan ini terpaksa buka mulut setelah dia dikeroyok oleh Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura, Sabtu, 17 September 2011. Dia mengatakan bahwa Dana Bantuan Studi yang dianggarkan sebesar Rp. 6 Milyar saat ini tidak bisa dibagikan kepada Mahasiswa Boven Digoel secara utuh sesuai ketentuan (Studi Berjalan Rp. 5 Juta dan Studi Akhir Rp. 10 Juta) karena “Wakil Bupati” Yesaya Merasi dan Kepala BPKAD Rudolf Kalalo telah mencuri Rp. 2,5 Milyar dari Pos tersebut. Dengan penjelasan Tambaip maka total dana yang dirampok saat ini berubah menjadi Rp. 94.415.000.000 + Rp. 2.500.000.000 = Rp. 96.915.000.000, sebuah angka yang sangat fantastis karena hampir menembus Rp. 97 Milyar dan jauh lebih besar dari angka Rp. 54,7 Milyar yang dicuri Yusak.

Secara khusus Rudolf Kalalo dan Yesaya Merasi saat ini sedang kalang kabut menghadapi tuntutan Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura yang cukup kritis. Langkah yang mereka ambil untuk mengatasi kebingungan adalah memanipulasi kesepakatan dengan membujuk pengurus Mahasiswa dengan berbagai cara agar pengurus yang jumlahnya tidak sampai 10 orang bisa mempengaruhi dan akhirnya mengorbankan kepentingan studi 600-an Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura. Semua ini dilakukan agar Rp. 96.915.000.000 yang dirampok oleh Merasi dan Kalalo tidak dipersoalkan. Secara khusus daya kritis Mahasiswa Boven Digoel mau ditumpulkan agar kejahatan terhadap rakyat Boven Digoel berjalan tanpa perlawanan dari kaum terpelajar.

Sumber Daya Manusia (SDM) Boven Digoel secara nyata terpuruk sejak Koruptor mengambilalih wilayah perbatasan RI-PNG tersebut dan memerasnya demi kebahagiaan segelintir orang yang berkuasa atau kebetulan dekat dengan kekuasaan. Angka putus sekolah meningkat tajam, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi menurun, waktu menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa menjadi lama karena kalender akademik diwarnai dengan cuti semester secara massal. Bagi yang terpaksa menyelesaikan studi maka kualitas mereka sangat diragukan karena proses menyerap ilmu berlangsung dalam kondisi yang memprihatinkan. Semua ini terjadi karena dana pendidikan terus mengalir dari pos anggaran ke rekening pribadi para Bandit. Korupsi saat ini secara nyata menjadi monster yang menghambat kemajuan SDM Boven Digoel.

Korupsi di Boven Digoel berjalan dengan subur karena mendapat pengamanan secara professional dari pihak kepolisian. Pengamanan dilakukan dalam bentuk terbuka maupun tertutup dengan cara-cara yang sangat licik, busuk dan memalukan karena institusi tersebut menjadikan Jasa Pengamanan terhadap Koruptor sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kondisi ini maka Kekuatan Mahasiswa Boven Digoel yang Solid menjadi satu-satunya senjata pamungkas yang dapat mematikan Koruptor. Ingatlah bahwa Intelektualitas tidak boleh dibiarkan menghamba kepada orang-orang yang membuat rakyat menderita!■